



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 161 /2024

TENTANG

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024, maka perlu menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara

f *70*

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

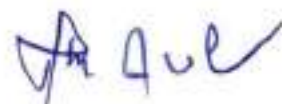
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 5 April 2024

Pj. BUPATI TABALONG, t



HAMIDA MUNAWARAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2024
TANGGAL

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL TAHUN 2024

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2024)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah		
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana	
SS.1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lircah, Kolaboratif, dan Akuntabel														
S.1 Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi														
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	92,60%	Penguatan implementasi penyederhanaan birokrasi dengan baik	Jumlah PD	SOTK telah memedomani sesuai permodelan penyederhanaan struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh MerpanRB	-	40	-	-	40	194.160.000,-	Bag Organisasi	Seluruh PD
				Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyederhanaan Birokrasi	Kali	Jumlah monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi	-	-	1	-	1		Bag Organisasi	Seluruh PD
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	75 %	Penyusunan draft peraturan kepala daerah tentang sistem kerja	Jumlah	Akan ditetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem kerja	-	1	-	-	1		Bag Organisasi	Seluruh PD
				Sosialisai peraturan kepala daerah tentang sistem kerja	Jumlah	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan penyesuaian mekanisme kerja	-	-	1	-	1		Bag Organisasi	Seluruh PD
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	a. Indeks SPBE	4,00	Membentuk Tim Koordinasi SPBE Tahun 2024	Unit	Terbentuknya Tim Koordinasi SPBE Kab. Tabalong	1	-	-	-	1	400.000.000	Sekretaris Daerah	Tim Koordinasi SPBE Ka. Tabalong Tahun 2024

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2024)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah	
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
			Reniu dokumen arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE Kab. Tabalong 2024	Dokumen	Surat Keputusan bupati atas reuiu arsitektur SPBE kab. Tabalong 2022 - 2024	2	-	-	-	2	400.000.000	Kabid penyelenggaraan e-Gov dan aplikasi	Tim koordinasi SPBE kab. Tabalong tahun 2024
			Mengumpulkan bukti-bukti dukung 47 Indikator penerapan SPBE di Kabupaten Tabalong	Indikator Penilaian SPBE Kementerian PAN-RB	Jumlah indikator sesuai bukti dukung	27	20	-	-	47		Diskominfo	Tim koordinasi SPBE kab. Tabalong tahun 2024
			Melakukan Entry dan Penilaian Mandiri Evaluasi SPBE	Entry	Persentase entry penilaian mandiri evaluasi SPBE 2024	-	-	100	-	100		Diskominfo	Diskominfo
	b. Tingkat Implementasi Iniatif Strategi Arsitektur SPBE	100%	Pertalkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong sesuai dengan Arsitektur SPBE Nasional	Jumlah	Revisi Peraturan Bupati Tabalong tentang Peta Proses Bisnis	-	1	-	-	1		Bagian Organisasi	Bagian Organisasi, Diskominfo, Bagian Hukum
		100%	Sosialisasi Arsitektur SPBE Kabupaten Tabalong 2022 - 2024	Kali	Kegiatan Sosialisasi Arsitektur SPBE dan Bimbingan Teknis untuk OPD	1	2	3	2	8		Diskominfo	Diskominfo
		100%	Pelaksanaan dan pengawasan e-government	kali	Audit internal TIK SPBE	-	1	-	-	1		Tim Koordinasi SPBE Kab. Tabalong Tahun 2024	Tim Koordinasi SPBE Kab. Tabalong Tahun 2024

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2024)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah		
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana	
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	80,01	Penguatan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Jumlah PD	Jumlah PD yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Baik	41	41	41	41	41		Bappeda Litbang	Seluruh PD
				Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi	Jumlah PD	Jumlah PD yang dimonitoring dan dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	41	41	41	41	41		Bappeda Litbang	Seluruh PD
				Dilakukannya tindak lanjut perbaikan LHE tahun 2023	Dokumen	Perbaikan Pohon kinerja, revidasi hasil LHE saki		1			1		Bappeda Litbang Organisasi dan Inspektorat	Seluruh PD
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital prima	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	40%	MPP kabupaten Tabalong menyiapkan platform MPP digital untuk layanan perizinan tenaga kesehatan diluar sistem oss dan layanan bidang administrasi kependudukan	Jumlah	Jumlah UPP yang melaksanakan pelayanan publik digital MPP	-	-	1	-	1		DPMPTSP	1 PD
				Konsultasi dan koordinasi ke Kemenpan RB	kali	Jumlah Konsultasi dan koordinasi MPP digital dalam pelaksanaan pelayanan publik	1	-	-	-	1		DPMPTSP	3 PD
				Koordinasi dengan dinas kominfo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	kali	Jumlah koordinasi dengan dinas teknis dalam pelaksanaan dan pengembangan aplikasi paliat online terintegrasi dalam pelayanan publik	1	2	-	-	3		DPMPTSP	3 PD
				Koordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri	Kali	Jumlah koordinasi dengan Kementerian DukCapil untuk pengembangan aplikasi paliat online terintegrasi	-	-	1	-	1		DPMPTSP	2 PD

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2024)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah		
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana	
			Koordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri	Kali	Jumlah koordinasi dengan Kementerian DukCapil untuk pengembangan aplikasi palat online terintegrasi	-	-	1	-	1		DPMPTSP	2 PD	
			Sosialisasi aplikasi Palat Online	Kali	Kegiatan Sosialisasi dan bimtek untuk pengguna layanan dan OPD Tekhnis terkait aplikasi Palat Online	-	-	1	2	3		DPMPTSP	2 PD	
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI - Jumlah PD yang mendapat Predikat WBK	2	Pembinaan pembangunan zona integritas unit kerja	jumlah	Jumlah unit kerja yang dilakukan pembinaan pembangunan zona integritas unit kerja	6	-	-	-	6		Inspektorat	6 unit kerja
			Penilaian Mandiri Pembangunan ZI oleh TPI	jumlah	Jumlah unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK	-	2	-	-	2		Inspektorat	2 unit kerja	
			Monev Pembangunan ZI	Kali	Jumlah Pelaksanaan Monev terkait dengan pembangunan Zona Integritas	10	-	-	-	10		Inspektorat	10 unit kerja	
			Pendampingan pembangunan ZI oleh TPI pada unit kerja yang lulus administrasi oleh TPN	kali	Jumlah unit kerja yang dilakukan pendampingan untuk mendapatkan predikat WBK	-	-	2	-	2			2 unit kerja	
7.	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3	Penguatan implementasi manajemen risiko unit	jumlah	Jumlah hasil pemetaan risiko dan permasalahan pengawasan unit kerja	-	20	-	-	20		Inspektorat	20 PD
			Rapat koordinasi rencana penilaian mandiri SPIP	jumlah	Jumlah rapat koordinasi rencana penilaian mandiri SPIP	1	-	-	-	1		Inspektorat	20 PD	
			Penjaminan Kualitas SPIP (QA)	jumlah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan penjaminan kualitas	-	20	-	-	20		Inspektorat	20 PD	

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2024)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah		
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana	
8.	penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui kanal SP4N	100 %	Pengelolaan pengaduan pelayanan publik	%	Persentase kecepatan respon / tanggapan pertama pengaduan melalui kanal SP4N LAPORI	25	25	25	25	100%		Kominfo	Seluruh PD
9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	82	Pemenuhan data responden Internal, External dan Exper	Jumlah	Jumlah Responden Internal	-	41	-	-	41		Inspektorat	Seluruh PD
					Jumlah	Jumlah Responden External	-	9	-	-	9		Inspektorat	9 PD
					Jumlah	Jumlah Responden Expert	-	12	-	-			Inspektorat	12 lembaga
				Sosialisasi Tindak pidana korupsi	Jumlah	Jumlah Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi			2	2	4		Inspektorat	Inspektorat, BPKSDM
		Indeks Upaya Pencegahan Korupsi Daerah	94	Pendampingan dan Monitoring 8 Area MCP KPK	Kali	Tertindakannya Monitoring 8 Area MCP KPK	-	8	8	8	24		Inspektorat	PD pengampu 8 area MCP
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	65	Melaksanakan Koordinasi dengan SKPD Teknis terkait Program Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Jumlah	Jumlah PD yang mengusulkan Pembentukan Produk Hukum Daerah	-	-	-	10	10		Bag. Hukum	SKPD Teknis yang mengusul Penyusunan Produk Hukum Daerah
				Meningkatkan Keterlibatan Pejabat Fungsional Suncang dalam pembentukan Produk Hukum Daerah	Jumlah	ASN yang menjabat sebagai Fungsional Suncang	1	1	1	1	1		Bag. Hukum	Bag. Hukum

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2024)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah		
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana	
			Pemenuhan Data Dukung dan Dokumen Penunjang lainnya dari SKPD Pengusul yang berkenaan dengan Proses Pembentukan Produk Hukum daerah	%	Dokumen dan Data Dukung Lainnya yang berkaitan dengan Tahapan Pembentukan Produk Hukum daerah	100%	100%	100%	100%	100%		Bag. Hukum	Bag. Hukum dan SKPD Pengusul	
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	67,22	Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah dengan Instansi yang berwenang	Jumlah	Rancangan Produk Hukum Daerah yang di Harmonisasi	1	1	1	1	1		Bag. Hukum	Bag. Hukum
			Melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Terhadap Produk Hukum Daerah Yang Telah Ditetapkan	Jumlah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang di lakukan Evaluasi dan Analisis	1	1	1	1	1		Bag. Hukum	Pejabat Fungsional Analis Hukum pada Bag. Hukum	
			Melaksanakan Pendokumentasian Produk Hukum dan Penyebarluasan Produk Hukum	%	Produk Hukum Yang di Publikasikan di JDIH	25	25	25	25	25		Bag. Hukum	Bag. Hukum	
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip - Indeks Pengawasan Kearsipan	70,01	Pembinaan Tata Kelola Kearsipan	Jumlah	Jumlah Pembinaan Tata Kelola Kearsipan	22	22	20	-	64	20.042.380	Bidang kearsipan	Seluruh PD/Kelurahan /Desa
			Pengawasan Kearsipan Internal	Jumlah	Jumlah Pengawasan Kearsipan Internal	0	5	5	5	15	99.510.909	Bidang kearsipan	Seluruh PD/Kelurahan /Desa	
			Penyusunan peraturan Bupati		Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati	-	1	-	-	1	-		Bidang kearsipan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
			Akuisisi arsip ke SKPD	Jumlah	Jumlah akuisisi Arsip ke SKPD	250	250	250	250	1000	74.804.860	Bidang kearsipan	Seluruh perangkat daerah	

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2024)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah		
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana	
			Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan melalui JIKN	Jumlah	Jumlah layanan penyediaan informasi akses dan layanan kearsipan melalui JIKN	100	100	100	100	400	313.951.399	Bidang kearsipan	Seluruh perangkat daerah	
13.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral (indeks pembangunan statistik sektoral)	2,5	Melaksanakan forum satu data daerah	kegiatan	Forum SDI		1		1	2		Bapedalitbang	1. Dinas Kominfo selaku Walidata 2. Semua PD selaku Produsen data 3. BPS selaku Pembina data
			Mengidentifikasi dan menyepakati indicator data yang diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	SKPD	SKPD yang dilakukan verifikasi atas indicator datanya		29			29		Bapedalitbang	1. Dinas Kominfo selaku walidata 2. Semua PD selaku produsen data 3. BPS selaku Pembina data	
			Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik di perangkat daerah	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan BPS atas pelaksanaan kegiatan statistik di perangkat daerah	20	20			40		Dinas Kominfo	1. Dinas Kominfo 2. Semua PD selaku produsen data 3. BPS selaku Pembina data	
			Melakukan survey kebutuhan data dan kepuasan layanan	kegiatan	Survey			1		1		Dinas Kominfo	1. Dinas Kominfo	
			Melengkapi metadata statistik	dokumen	Dokumen metadata yang disusun				1	1		Dinas Kominfo	Semua PD selaku produsen data	
			Mengembangkan system elektronik (apikasi) untuk mendukung penyelenggaraan statistik sektoral	jumlah	Sistem elektronik		1			1		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2024)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah		
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana	
			Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegritas	orang	SDM yang mengikuti DIKLAT dan BIMTEK			126	20	146		Dinas kominfo	1. Dinas Kominfo selaku validasi data 2. Semua PD selaku produsen data 3. BPS selaku Pembina data	
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	70,01	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah PD	Jumlah PD yang telah melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan baik	41	41	41	41	41		BPBJAP	Seluruh PD
			Monitoring dan evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah PD	Jumlah PD yang dimonitoring dan dievaluasi implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	41	41	41	41	41		BPBJAP	Seluruh PD	
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	93 %	Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut yang telah disampaikan ke BPK	Kali	Jumlah monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	3	3	3	3	12	Rp. 342.863.000	Inspektorat	Seluruh PD
			Melakukan koordinasi dengan PD terkait hasil temuan BPK	Kali	Jumlah Rapat Koordinasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	3	3	3	3	12		Inspektorat	Seluruh PD	
			Melakukan penagihan dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Kali	Jumlah penagihan hasil penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	3	3	3	3	12		Inspektorat	Seluruh PD	
			Melakukan koordinasi dengan BPK untuk PD dengan temuan terbanyak	Kali	Jumlah penagihan hasil penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	-	-	1	0	1		Inspektorat	BPKAD, PUPR, Setda, Baperda, Disdikbud	
		Opni BPK	WTP	Melakukan Reviu LKPD	Jumlah	Terlaksananya Reviu LKPD	1	-	-	-	1		Inspektorat	Seluruh PD

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2024)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah		
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana	
SS.2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional														
16.	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	100 %	Optimalisasi penyetaraan Jabatan Fungsional	%	Seluruh Eselon IV kecuali Kasubag Keuangan pada PD dan Eselon IV pada Kecamatan dan kelurahan telah disetarakan menjadi jabatan fungsional	100 %				100%		BKPSDM	BKPSDM
				Pelaksanaan mekanisme kinerja jabatan fungsional	%	Seluruh ASN dalam jabatan fungsional penyetaraan telah melaksanakan kinerja sesuai Menpan 7 tahun 2022		25%	50%	25%	100%		BKPSDM	BKPSDM
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	N/A	Perencanaan untuk menyusun Tim Manajemen Talenta, Jabatan Target dan pola karir	dokumen	Tersusun SK Tim Manajemen Talenta, SK Pola Karir dan jabatan target	-	-	-	1	1		BKPSDM	BKPSDM
				Penilaian ASN terkait kinerja, kompetensi, rekam jejak dan kelompok rencana suksesi	Kali	Penilaian kinerja, kompetensi dan rekam jejak ASN	-	-	-	1	1		BKPSDM	BKPSDM
				Menyusun pengembangan dan promosi kelompok rencana suksesi	Kali	Pelaksanaan pengembangan dan promosi				1	1		BKPSDM	BKPSDM
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	86 %	Pembangunan Aplikasi e-SKP sesuai Permenpan 8 tahun 2022	Jumlah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	-	1	-	-	1		BKPSDM	BKPSDM
				Migrasi Data SKP sesuai Permenpan 8 tahun 2022	%	Persentase migrasi data SKP sesuai Permenpan 8 tahun 2022		100 %	100 %	100 %	100%		BKPSDM	BKPSDM

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2024)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah		
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana	
			Sosialisasi e-SKP dan sesuai Permenpan 6 tahun 2022	%	Persentase jumlah PD yang mendapat sosialisasi-SKP dan sesuai Permenpan 6 tahun 2022			100 %	100 %	100%		BKPSDM	BKPSDM	
19.	Capaian pelaksanaan kebijakan RB.	Indeks Sistem Merit	84,85	Melaksanakan asesmen kompetensi	orang	Jumlah pegawai yang mengikuti asesmen kompetensi	-	381	-	-	381		BKPSDM	Kepala sekolah dan kepala PKM
			Melakukan pemetaan pegawai	orang	Jumlah pegawai yang telah dipetakan	357	-	-	-	357		BKPSDM	Seluruh SKPD	
			Melakukan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	Unit kerja	Jumlah unit kerja yang mengusulkan kebutuhan diklat	-	29		-	29		BKPSDM	Seluruh SKPD	
			Rapat tim penilai kinerja untuk pelaksanaan mutasi dan promosi	kali	Jumlah rapat tim penilaian kinerja	1	1	1	1	4		BKPSDM	Seluruh SKPD	
			Melakukan pemantauan dan pembinaan kinerja ke semua unit kerja	Unit kerja	Jumlah unit kerja yang dilakukan pembinaan	5	5	5	5	20		BKPSDM	Seluruh SKPD	
20.	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	65,1 %	Sosialisasi internalisasi ASN BerAKHLAK	Jumlah	Jumlah kegiatan sosialisasi ASN BerAKHLAK			1	1		Bag. Organisasi	Seluruh PD	
		Employee Branding	68 %	Pelaksanaan Survei Core Value ASN BerAKHLAK	Jumlah	Jumlah kegiatan Survei Core Value ASN BerAKHLAK yang dilaksanakan			1	1		Bag. Organisasi	Seluruh PD	
			Penyusunan Banner, Brosur, Buku Panduan, Layout Zoom, Video	Jumlah	Jumlah jenis media untuk pelaksanaan publikasi			2	3	5		Bag. Organisasi	Seluruh PD	
21.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85	Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan SKM Kabupaten Tabalong	Jumlah SK Tim	Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan SKM Kabupaten Tabalong		1		1		Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2024)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah	
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
			Penyampaian surat pemberitahuan pelaksanaan SKM ke seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP)	Jumlah UPP	Jumlah UPP yang melaksanakan SKM			59		59		Bag. Organisasi	Bag. Organisasi
			Pendampingan dan monitoring pelaksanaan SKM	%	Persentase UPP yang melaksanakan SKM sesuai PermenPANRB No. 14 Tahun 2017			100%		100%		Bag. Organisasi	Bag. Organisasi
			Penyusunan Laporan SKM	%	Persentase UPP pelaksana SKM yang menyusun Laporan SKM				100%	100%		Bag. Organisasi	Bag. Organisasi
	Indeks Pelayanan Publik	4,60	Membentuk Tim Pemanbantuan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Kabupaten Tabalong	Jumlah SK Tim	Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim PEKPPP Kabupaten Tabalong		1			1		Bag. Organisasi	Bag. Organisasi
			Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan (PEKPPP) dengan Unit Lokus Evaluasi (ULE)	Kali	Jumlah rapat yang dilaksanakan		2			2		Bag. Organisasi	Bag. Organisasi
			Monitoring pengisian formulir F01 sistem evaluasi oleh ULE	%	Persentase keterisian formulir F01 sistem evaluasi oleh ULE			100%		100%		Bag. Organisasi	Bag. Organisasi
			Monitoring pengisian formulir F03 persepsi masyarakat terhadap ULE	%	Persentase ULE yang telah memenuhi minimal 15 responden mengisi F03			100%		100%		Bag. Organisasi	Bag. Organisasi
			Menginput data evaluasi mandiri pada formulir F02 pada sistem evaluasi oleh Tim PEKPPP Kab. Tabalong	%	Persentase keterisian formulir F02 pada sistem evaluasi oleh Tim PEKPPP Kab. Tabalong			100%		100%		Bag. Organisasi	Bag. Organisasi

IV.1. Kebijakan dan Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023-2024

Tabel 4. 3 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
1. PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN															
Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong	Menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong	Angka kemiskinan	5,55	Meningkatkan cakupan penerima manfaat program pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin	%	% PPKS yang mendapatkan bantuan (rasda, aslut, disabilitas, anak panti, beasiswa)	25%	25%	25%	25%	100%	Terkait	98.806.362,852	BAPPEDALIT BANG	Dinas Sosial, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR
				Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	WUB	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan pendapatan	28	28	28	28	112	Terkait	480.350.772	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Dinas KopUMKM, Perindag
				Meningkatnya cakupan masyarakat miskin yang menerima bantuan permodalan	keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif (UEF)		40	40	40	120	Terkait	800.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
				Meningkatkan ketepatan pen sasaran penerima program penanganan kemiskinan	%	Persentase SKPD/Desa/Kel & Pihak terkait lainnya yang memanfaatkan data SILANGKAR		75%	100%	100%	100%		100.000.000	BAPPEDALIT BANG	Semua SKPD, Desa/Kelurahan serta pihak terkait lain

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
					Jumlah	Tersedianya Perbup terkait SILANGKAR			1		1	Terkait	10.000.000	BAPPEDALIT BANG	Bappedalitbang, Dinsos, Bagian Hukum
					%	% desa/kelurahan yang melakukan update data SILANGKAR		100%			100%	Terkait	100.000.000	Bappedalit bang, Dinas PMD, Dinas sosial	Bappedalitbang, Dinas Sosial, Dinas PMD, Desa/kei, Kecamatan
2. PENGENDALIAN INFLASI															
Fluktuasi harga dan ketersediaan bapokting di daerah	kestabilan harga dan ketersediaan bapokting, terjaganya daya beli masyarakat	Kestabilan angka inflasi daerah ($\pm 2,5\%$)	3,85 %	Pemantauan harga dan ketersediaan bapokting di toko modern, distributor dan agen	Jumlah	Jumlah kegiatan pemantauan harga di pasar dan koordinasi ke distributor	4	4	4	4		Terkat		Dinas koperasi, UKM perindag	Seluruh unit kerja terkait
				Melakukan operasi pasar murah di kota dan seluruh kecamatan	Jumlah	Kegiatan pasar murah yang dilakukan baik dikota maupun di seluruh kecamatan	7	7	7	7		Terkait		Dinas koperasi UKM	Seluruh Unit Kerja Terkait
				Pelaksanaan kerjasama antar daerah	Kota/ daerah	Jumlah PKS / NKB dengan daerah penghasilan	1			1		Terkait	50 juta pada perjalanan dinas	EKOBANG	Seluruh unit kerja terkait
				Koordinasi / high level meeting / capacity building dengan TPIP, TPID Provinsi, maupun TPID daerah lain	Kegiatan	Jumlah koordinasi, HLM maupun capacity building	1	1	1	1		Terkait	50 juta pada perjalanan dinas	EKOBANG	Seluruh unit kerjaterkait

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
3 DIGITALISASI PEMERINTAHAN (Stunting)															
Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Tabalong	Menurunnya angka stunting melalui tata Kelola pemerintahan berbasis TIK	Persentase stunting	% 10,5	Meningkatkan Cakupan Layanan Kesehatan Bayi dan Balita melalui media KIE Berbasis TIK (Aplikasi Si Mas Ganteng Kelua, Si Gadis Tanjung, Si Bungas)	Persen tase	Balita yang datang ke Posyandu	85%	0%	85%	0%	85%	Terkait		Bappedalit bang	Seluruh unit kerja terkait
						18 Bidan dan 18 Petugas Gizi di 18 Puskesmas yang mengikuti WorkShop Media KIE Berbasis TIK	0%	0%	0%	50%	50%	Terkait		Bappedalit bang	Seluruh unit kerja terkait
						18 Bidan dan 18 Petugas Gizi di 18 Puskesmas yang melaporkan secara digital	0%	0%	0%	50%	50%	Terkait		Bappedalit bang	Seluruh unit kerja terkait
4 PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Peningkatan realisasi pengadaan Produk Dalam Negeri oleh Perangkat Daerah	Meningkatkan realisasi Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi pengadaan Produk Dalam Negeri	90%	Pengendalian pengadaan produk dalam negeri terhadap alokasi belanja pengadaan	%	Persentase realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri terhadap Alokasi Belanja Pengadaan	0	25%	50%	95%	95%	Terkait		BPBJAP	Seluruh unit kerja terkait

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Setuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
5. PENINGKATAN INVESTASI															
Peningkatan Investasi penanaman Modal	Meningkatnya penanaman Modal di Kabupaten Tabalong	Penyelenggaraan Pelaksanaan Penanaman Modal	1,01 T	Membuat perda tentang penyelenggaraan penanaman modal	Jumlah	Jumlah perda dan dokumen peta potensi dan peluang investasi			1	1	1	Terkait		DPMPTSP	Seluruh unit kerja terkait
				Konsultasi dan koordinasi ke instansi terkait	kali	Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam hal pembuatan perda dan pembuatan peta potensi dan peluang investasi			1	1	1	Terkait		DPMPTSP	Seluruh unit kerja terkait

Pj. BUPATI TABALONG, f

Handwritten signature

f. HAMIDA MUNAWARAH